



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADIB SUHARTO**
2. Jabatan : **KASI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**
3. NHK : **209444**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 190 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
3. Tanah Seluas 292 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/87 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 45.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SOLUNA SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 38.500.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 10.000.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.243.500.000**

III. HUTANG **Rp. 259.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

984.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **16 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.